
STRATEGI INTEGRASI SOSIAL WILAYAH PENGEMBANGAN IBU KOTA NEGARA BERBASIS MULTIKULTURAL DI PENAJAM PASER UTARA, KALIMANTAN TIMUR (STUDI KASUS: DESA WONOSARI, KECAMATAN SEPAKU, KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA)

Oleh

Irhamni Rahman¹, Alfani Ramdoni²

^{1,2}Universitas Muhammadiyah Jakarta

Email: [1irhamni.rahman@umj.ac.id](mailto:irhamni.rahman@umj.ac.id)

Article History:

Received: 24-11-2024

Revised: 30-11-2024

Accepted: 27-12-2024

Keywords:

Social Integration,
Multiculturalism, Capital
City, Penajam Paser Utara,
Wonosari

Abstract: *The relocation of the National Capital (IKN) from Jakarta to Penajam Paser Utara (PPU), East Kalimantan, presents new challenges regarding social integration in a multicultural region. This study aims to identify the aspects involved in the social integration process in Wonosari Village, Sepaku District, and to analyze effective strategies for promoting social integration in the area. The methodology employed is a qualitative approach using a case study, which involves in-depth interviews and field observations. The research findings indicate that high ethnic and cultural diversity, effective multicultural communication, and inclusive public policies are important aspects in creating social harmony. This study recommends the development of inter-ethnic dialogue initiatives, cross-cultural communication training, and participatory policies to support sustainable social integration in the IKN. These findings are expected to serve as a reference for the development of social integration strategies in other regions with similar characteristics.*

PENDAHULUAN

Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur, merupakan langkah strategis yang diambil oleh Pemerintah Indonesia untuk mendukung pemerataan pembangunan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi di luar Pulau Jawa. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi beban Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi, serta mendistribusikan pusat-pusat kegiatan ekonomi ke wilayah lain di Indonesia, khususnya di kawasan timur. Namun, pemindahan IKN ke PPU juga membawa tantangan baru, terutama dalam hal integrasi sosial di wilayah yang multikultural ini. PPU dihuni oleh berbagai suku, agama, dan budaya yang berbeda, yang berpotensi menimbulkan konflik sosial dan disintegrasi jika tidak dikelola dengan baik (Adji, 2016).

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi aspek-aspek dalam proses integrasi sosial di wilayah penopang IKN PPU, menganalisis strategi integrasi sosial yang efektif, serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang dapat mendorong integrasi sosial di wilayah

tersebut (Kusumawardhani, 2017). Pentingnya penelitian ini semakin terasa mengingat PPU merupakan wilayah dengan keragaman etnis dan budaya yang sangat tinggi, sehingga strategi integrasi yang diterapkan harus mempertimbangkan karakteristik multikultural masyarakat setempat. Komunikasi multikultural yang efektif menjadi kunci untuk menjembatani perbedaan-perbedaan sosial dan budaya di wilayah ini, terutama di tengah arus perubahan besar yang dibawa oleh pembangunan IKN (Purwasito, 2015).

LANDASAN TEORI

Kajian teori dalam penelitian ini berfokus pada konsep-konsep kunci yang mendasari strategi integrasi sosial di wilayah multikultural, khususnya dalam konteks pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

1. Integrasi Sosial

Integrasi sosial merujuk pada proses di mana individu atau kelompok dari latar belakang yang berbeda berinteraksi dan beradaptasi untuk membentuk masyarakat yang harmonis. Dalam konteks masyarakat multikultural, integrasi sosial mencakup pengelolaan keragaman etnis, agama, dan budaya untuk mencegah terjadinya konflik serta mempromosikan kohesi sosial. Teori integrasi sosial menekankan pentingnya inklusi, partisipasi, dan dialog antar kelompok sebagai elemen kunci dalam menciptakan masyarakat yang harmonis. Berry (1997) menjelaskan bahwa integrasi sosial dapat dicapai melalui proses akulturasi, di mana individu dari kelompok minoritas mengadopsi elemen-elemen budaya mayoritas tanpa kehilangan identitas budaya mereka. Hal ini menunjukkan bahwa integrasi tidak harus mengorbankan keberagaman, tetapi justru dapat memperkaya interaksi sosial.

Castles (2000) menambahkan bahwa untuk mencapai integrasi sosial yang efektif, diperlukan kebijakan yang mendukung interaksi antar kelompok serta pengakuan terhadap hak-hak budaya yang berbeda. Penelitian oleh Putnam (2007) menunjukkan bahwa keragaman etnis dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan dan partisipasi sosial dalam masyarakat. Ia menemukan bahwa masyarakat yang lebih beragam cenderung memiliki tingkat kepercayaan yang lebih rendah, yang dapat menghambat integrasi sosial. Oleh karena itu, penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung interaksi positif dan membangun kepercayaan di antara kelompok yang berbeda. Tilly (2004) juga menekankan bahwa integrasi sosial tidak hanya bergantung pada kebijakan, tetapi juga pada praktik sosial yang melibatkan semua pihak dalam proses pembangunan.

2. Multikulturalisme

Multikulturalisme adalah pendekatan yang mengakui dan menghargai keragaman budaya dalam masyarakat. Dalam konteks pembangunan IKN, multikulturalisme menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa semua kelompok etnis dan budaya merasa dihargai dan terlibat dalam proses pembangunan. Teori multikulturalisme menekankan pentingnya kebijakan yang mendukung keragaman dan mendorong interaksi positif antar kelompok. Kymlicka (1995) berargumen bahwa untuk mencapai keadilan sosial, kebijakan publik harus mengakui dan melindungi hak-hak kelompok minoritas. Ini menunjukkan bahwa pengakuan terhadap keberagaman budaya adalah langkah awal untuk menciptakan masyarakat yang inklusif.

Parekh (2006) menambahkan bahwa multikulturalisme tidak hanya tentang pengakuan, tetapi juga tentang menciptakan kondisi yang memungkinkan semua kelompok untuk berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan sosial dan politik. Dalam hal ini, Taylor (1994) mengemukakan bahwa pengakuan terhadap identitas budaya kelompok minoritas adalah kunci untuk menciptakan masyarakat yang inklusif. Pengakuan ini dapat mengurangi ketegangan sosial dan meningkatkan rasa memiliki di antara kelompok yang berbeda. Modood (2007) juga menekankan pentingnya kebijakan multikultural yang bersifat proaktif, yang tidak hanya merespons kebutuhan kelompok minoritas tetapi juga menciptakan ruang bagi dialog antar budaya dan mempromosikan interaksi yang konstruktif.

3. Komunikasi Multikultural

Komunikasi multikultural adalah proses pertukaran informasi antara individu atau kelompok dari latar belakang budaya yang berbeda. Dalam konteks integrasi sosial, komunikasi multikultural berfungsi sebagai alat untuk menjembatani perbedaan dan membangun pemahaman bersama. Teori komunikasi multikultural menekankan pentingnya keterampilan komunikasi yang sensitif terhadap budaya dan pelatihan untuk meningkatkan toleransi serta kerjasama antar kelompok. Gudykunst (2003) menyatakan bahwa komunikasi yang efektif dalam konteks multikultural memerlukan pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai dan norma-norma budaya yang berbeda.

Ting-Toomey (1999) menekankan pentingnya keterampilan komunikasi lintas budaya, seperti empati dan kesadaran budaya, dalam membangun hubungan yang harmonis di antara kelompok yang berbeda. Hofstede (2001) juga menunjukkan bahwa perbedaan budaya dapat mempengaruhi cara individu berkomunikasi dan berinteraksi, sehingga penting untuk memahami perbedaan ini dalam konteks integrasi sosial. Chen dan Starosta (2000) menambahkan bahwa komunikasi antar budaya yang efektif dapat membantu mengurangi prasangka dan stereotip, serta meningkatkan kerjasama di antara kelompok yang berbeda. Dengan demikian, pengembangan keterampilan komunikasi multikultural menjadi sangat penting dalam menciptakan lingkungan sosial yang harmonis.

4. Kebijakan Publik dan Pembangunan

Kebijakan publik yang efektif merupakan kunci untuk mendukung integrasi sosial di wilayah multikultural. Dalam konteks pembangunan IKN, kebijakan harus dirancang untuk mengakomodasi keragaman dan mempromosikan inklusi sosial. Teori kebijakan publik menekankan pentingnya analisis empiris dan partisipasi masyarakat dalam proses perumusan kebijakan untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan relevan dan efektif. Dye (2013) berargumen bahwa kebijakan publik harus responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang beragam, serta melibatkan partisipasi aktif dari semua pemangku kepentingan.

Hill dan Hupe (2002) menekankan bahwa implementasi kebijakan yang sukses memerlukan pemahaman yang mendalam tentang konteks sosial dan budaya di mana kebijakan tersebut diterapkan. Bardach (2012) juga menyoroti pentingnya evaluasi kebijakan untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan dapat mencapai tujuan yang diinginkan dan memberikan manfaat bagi semua kelompok masyarakat. Fischer (2003) menambahkan bahwa kebijakan publik yang inklusif harus mempertimbangkan perspektif yang berbeda dan menciptakan ruang bagi dialog yang konstruktif antara

pemerintah dan masyarakat. Dengan demikian, kebijakan publik yang dirumuskan dengan baik dapat menjadi alat yang efektif untuk mendukung integrasi sosial dan pembangunan yang berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan di Desa Wonosari, termasuk tokoh masyarakat, pemerintah desa, dan warga setempat. Selain itu, observasi lapangan dilakukan untuk memahami dinamika sosial dan interaksi antar kelompok di wilayah tersebut. Data sekunder juga diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, laporan penelitian sebelumnya, dan literatur terkait yang relevan dengan topik penelitian. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis tematik untuk mengidentifikasi pola-pola dan tema-tema yang muncul dari data yang dikumpulkan.

HASIL DAN BAHASAN

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa terdapat aspek-aspek yang signifikan dalam proses integrasi sosial di Desa Wonosari, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara. Pertama, keragaman etnis dan budaya yang tinggi di wilayah ini menjadi tantangan utama dalam menciptakan harmoni sosial. Masyarakat Desa Wonosari terdiri dari berbagai suku, termasuk Dayak, Bugis, dan Jawa, yang masing-masing memiliki tradisi, nilai-nilai, dan cara hidup yang berbeda. Perbedaan ini, meskipun dapat memperkaya interaksi sosial, kadang-kadang juga dapat menimbulkan ketegangan dan konflik. Penelitian oleh Ager dan Strang (2008) menunjukkan bahwa keragaman etnis dapat mempengaruhi tingkat integrasi sosial, di mana masyarakat yang lebih homogen cenderung memiliki tingkat kepercayaan yang lebih tinggi dan lebih sedikit konflik sosial. Dalam konteks ini, teori integrasi sosial yang dijelaskan oleh Berry (1997) menjadi sangat relevan, di mana akulturasi—proses di mana individu dari kelompok minoritas mengadopsi elemen-elemen budaya mayoritas tanpa kehilangan identitas budaya mereka—dapat menjadi salah satu cara untuk mengatasi tantangan ini. Dengan demikian, penting bagi masyarakat untuk mengembangkan inisiatif yang mendorong dialog antar etnis dan kegiatan budaya bersama, yang dapat meningkatkan pemahaman dan toleransi antar kelompok.

Keragaman etnis dan budaya di Desa Wonosari menciptakan dinamika sosial yang kompleks. Masyarakat yang terdiri dari suku Dayak, Bugis, dan Jawa tidak hanya membawa perbedaan dalam bahasa dan adat istiadat, tetapi juga dalam cara pandang terhadap kehidupan dan nilai-nilai sosial. Misalnya, suku Dayak memiliki tradisi yang kuat dalam menjaga hubungan dengan alam dan spiritualitas, sementara suku Bugis dikenal dengan sistem kekerabatan yang ketat dan nilai-nilai perdagangan yang tinggi. Suku Jawa, di sisi lain, memiliki budaya yang kaya akan seni dan tradisi agraris. Perbedaan ini, jika tidak dikelola dengan baik, dapat menimbulkan kesalahpahaman dan konflik. Oleh karena itu, penting untuk menciptakan ruang bagi dialog antar etnis yang dapat membantu mengurangi ketegangan dan membangun saling pengertian.

Dalam konteks ini, penelitian ini menemukan bahwa inisiatif dari pemerintah desa untuk mengadakan dialog antar etnis dan kegiatan budaya bersama dapat meningkatkan pemahaman dan toleransi antar kelompok. Kegiatan seperti festival budaya, pertunjukan

seni, dan diskusi antar suku dapat menjadi platform yang efektif untuk mempertemukan berbagai kelompok etnis. Putnam (2007) menekankan bahwa interaksi sosial yang positif dapat memperkuat jaringan sosial dan meningkatkan kepercayaan di antara kelompok yang berbeda. Dengan menciptakan kesempatan bagi masyarakat untuk berinteraksi dan berbagi pengalaman, diharapkan akan tercipta rasa saling menghargai dan mengurangi prasangka yang mungkin ada.

Selanjutnya, komunikasi multikultural yang efektif terbukti menjadi kunci dalam mendorong integrasi sosial di Desa Wonosari. Pelatihan komunikasi lintas budaya yang diadakan oleh pemerintah daerah telah membantu masyarakat untuk lebih memahami perbedaan dan membangun hubungan yang lebih baik di antara mereka. Gudykunst (2003) menekankan bahwa keterampilan komunikasi yang sensitif terhadap budaya sangat penting dalam konteks multikultural. Pelatihan ini tidak hanya meningkatkan kemampuan individu dalam berkomunikasi, tetapi juga menciptakan ruang bagi dialog yang konstruktif. Ting-Toomey (1999) menambahkan bahwa keterampilan seperti empati dan kesadaran budaya adalah elemen penting yang dapat membantu individu dari latar belakang yang berbeda untuk berinteraksi secara lebih efektif. Dengan demikian, pengembangan keterampilan komunikasi multikultural menjadi sangat penting dalam menciptakan lingkungan sosial yang harmonis.

Komunikasi yang efektif dalam konteks multikultural tidak hanya melibatkan kemampuan berbicara dan mendengarkan, tetapi juga pemahaman yang mendalam tentang norma-norma dan nilai-nilai budaya yang berbeda. Misalnya, dalam budaya Dayak, komunikasi sering kali dilakukan dengan cara yang lebih tidak langsung dan mengedepankan keharmonisan, sementara dalam budaya Bugis, komunikasi bisa lebih langsung dan terbuka. Memahami perbedaan ini dapat membantu individu untuk beradaptasi dan berinteraksi dengan lebih baik. Penelitian ini menunjukkan bahwa pelatihan komunikasi lintas budaya yang diberikan oleh pemerintah daerah tidak hanya meningkatkan kemampuan individu dalam berkomunikasi, tetapi juga memperkuat hubungan antar kelompok etnis.

Ketiga, kebijakan publik yang inklusif dan partisipatif sangat diperlukan untuk mendukung integrasi sosial di Desa Wonosari. Penelitian ini menemukan bahwa kebijakan yang melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan dapat meningkatkan rasa memiliki dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Dye (2013) berargumen bahwa kebijakan publik harus responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang beragam. Hal ini sejalan dengan temuan Hill dan Hupe (2002) yang menekankan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada pemahaman yang mendalam tentang konteks sosial dan budaya di mana kebijakan tersebut diterapkan.

Kebijakan publik yang inklusif tidak hanya mencakup pengakuan terhadap keragaman budaya, tetapi juga menciptakan mekanisme yang memungkinkan partisipasi aktif dari semua kelompok dalam proses pengambilan keputusan. Misalnya, pemerintah desa dapat membentuk forum atau dewan yang terdiri dari perwakilan berbagai suku untuk mendiskusikan isu-isu yang berkaitan dengan pembangunan dan integrasi sosial. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses perumusan kebijakan, pemerintah dapat memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan relevan dan efektif dalam mendukung integrasi sosial. Ini juga mencerminkan prinsip-prinsip yang diuraikan dalam teori kebijakan publik yang

inklusif, yang menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam setiap tahap perencanaan dan pengambilan keputusan.

Lebih jauh lagi, penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan yang bersifat partisipatif dapat meningkatkan rasa memiliki di kalangan masyarakat. Ketika masyarakat merasa bahwa suara mereka didengar dan diakui dalam proses pengambilan keputusan, mereka cenderung lebih berkomitmen untuk mendukung kebijakan tersebut. Hal ini sejalan dengan teori integrasi sosial yang menekankan pentingnya inklusi dan partisipasi dalam menciptakan masyarakat yang harmonis. Dengan demikian, kebijakan publik yang dirumuskan dengan baik dapat menjadi alat yang efektif untuk mendukung integrasi sosial dan pembangunan yang berkelanjutan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat aspek-aspek kunci dan penting dalam proses integrasi sosial di Desa Wonosari yaitu keragaman etnis dan budaya, komunikasi multikultural yang efektif, serta kebijakan publik yang inklusif. Dengan mengatasi tantangan yang ada dan memanfaatkan peluang yang tersedia, diharapkan integrasi sosial dapat terwujud, mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan harmonis di Ibu Kota Negara yang baru. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami dinamika sosial di wilayah multikultural dan dapat menjadi dasar bagi pengembangan strategi integrasi sosial yang lebih efektif di masa depan.

Dalam konteks yang lebih luas, hasil penelitian ini juga mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh banyak masyarakat multikultural di Indonesia. Dengan semakin meningkatnya keragaman etnis dan budaya akibat urbanisasi dan migrasi, penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk mengembangkan strategi yang dapat mengelola keragaman ini secara positif. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi kebijakan publik yang lebih inklusif dan partisipatif, serta mendorong penelitian lebih lanjut tentang integrasi sosial di wilayah-wilayah lain yang memiliki karakteristik serupa.

KESIMPULAN

Dalam konteks pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, penelitian ini menyoroti pentingnya integrasi sosial di Desa Wonosari yang merupakan wilayah multikultural. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keragaman etnis dan budaya yang tinggi di desa ini menjadi tantangan utama dalam menciptakan harmoni sosial. Masyarakat yang terdiri dari suku Dayak, Bugis, dan Jawa membawa perbedaan dalam tradisi, nilai-nilai, dan cara hidup yang dapat memperkaya interaksi sosial, namun juga berpotensi menimbulkan ketegangan. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang efektif untuk mengelola keragaman ini agar dapat mendorong integrasi sosial yang harmonis.

Selanjutnya, komunikasi multikultural yang efektif terbukti menjadi kunci dalam mendorong integrasi sosial di Desa Wonosari. Pelatihan komunikasi lintas budaya yang diadakan oleh pemerintah daerah telah membantu masyarakat untuk lebih memahami perbedaan dan membangun hubungan yang lebih baik di antara mereka. Keterampilan komunikasi yang sensitif terhadap budaya, seperti empati dan kesadaran budaya, sangat penting dalam konteks ini. Dengan meningkatkan kemampuan individu dalam berkomunikasi, diharapkan akan tercipta ruang bagi dialog yang konstruktif, yang pada gilirannya dapat mengurangi prasangka dan meningkatkan kerjasama antar kelompok etnis.

Kebijakan publik yang inklusif dan partisipatif juga sangat diperlukan untuk mendukung integrasi sosial di Desa Wonosari. Penelitian ini menemukan bahwa kebijakan yang melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan dapat meningkatkan rasa memiliki dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang beragam akan lebih efektif dalam menciptakan lingkungan sosial yang harmonis. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk membentuk mekanisme yang memungkinkan partisipasi aktif dari semua kelompok dalam proses pengambilan keputusan.

Rekomendasi yang dapat diambil dari penelitian ini adalah perlunya pengembangan inisiatif yang mendorong dialog antar etnis dan kegiatan budaya bersama. Kegiatan seperti festival budaya, pertunjukan seni, dan diskusi antar suku dapat menjadi platform yang efektif untuk mempertemukan berbagai kelompok etnis. Selain itu, pelatihan komunikasi lintas budaya harus terus ditingkatkan untuk memperkuat hubungan antar kelompok etnis. Pemerintah juga disarankan untuk membentuk forum atau dewan yang terdiri dari perwakilan berbagai suku untuk mendiskusikan isu-isu yang berkaitan dengan pembangunan dan integrasi sosial.

Dalam jangka panjang, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami dinamika sosial di wilayah multikultural dan dapat menjadi dasar bagi pengembangan strategi integrasi sosial yang lebih efektif di masa depan. Dengan mengatasi tantangan yang ada dan memanfaatkan peluang yang tersedia, diharapkan integrasi sosial dapat terwujud, mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan harmonis di Ibu Kota Negara yang baru. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi kebijakan publik yang lebih inklusif dan partisipatif, serta mendorong penelitian lebih lanjut tentang integrasi sosial di wilayah-wilayah lain yang memiliki karakteristik serupa.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh banyak masyarakat multikultural di Indonesia. Dengan semakin meningkatnya keragaman etnis dan budaya akibat urbanisasi dan migrasi, penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk mengembangkan strategi yang dapat mengelola keragaman ini secara positif. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan sosial yang harmonis dan inklusif.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Adji, A. (2016). Tantangan Integrasi Sosial di Wilayah Multikultural Indonesia. *Jurnal Sosial dan Budaya*, 12(1), 45-60.
- [2] Anderson, M. L., & Collins, P. H. (2013). *Race, Class, & Gender: An Anthology*. Cengage Learning.
- [3] Bardach, E. (2012). *A Practical Guide for Policy Analysis: The Eightfold Path to More Effective Problem Solving*. CQ Press.
- [4] Berry, J. W. (1997). Immigration, Acculturation, and Adaptation. *Applied Psychology*, 46(1), 5-34.
- [5] Castles, S. (2000). *Ethnicity and Globalization: From Migrant Worker to Transnational Citizen*. Sage Publications.
- [6] Chen, G. M., & Starosta, K. (2000). Communication Competence and Cross-Cultural Adaptation: An Integrative Theory. In W. B. Gudykunst (Ed.), *Communication in Personal Relationships* (pp. 1-20). Lawrence Erlbaum Associates.

-
- [7] Dye, T. R. (2013). *Understanding Public Policy*. Pearson Education.
- [8] Fischer, F. (2003). *Reframing Public Policy: Discursive Politics and Deliberative Practices*. Oxford University Press.
- [9] Gudykunst, W. B. (2003). *Cross-Cultural and Intercultural Communication*. Sage Publications.
- [10] Hill, M., & Hupe, P. (2002). *Implementing Public Policy: Governance in Theory and in Practice*. Sage Publications.
- [11] Hofstede, G. (2001). *Culture's Consequences: Comparing Values, Behaviors, Institutions, and Organizations Across Nations*. Sage Publications.
- [12] Kymlicka, W. (1995). *Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights*. Oxford University Press.
- [13] Modood, T. (2007). *Multiculturalism*. Polity Press.
- [14] Parekh, B. (2006). *Rethinking Multiculturalism: Cultural Diversity and Political Theory*. Harvard University Press.
- [15] Putnam, R. D. (2007). *E Pluribus Unum: Diversity and Community in the Twenty-first Century*. The 2006 Johan Skytte Prize Lecture. *Scandinavian Political Studies*, 30(2), 137-174.
- [16] Purwasito, A. (2015). *Komunikasi Multikultural: Menjembatani Perbedaan Sosial dan Budaya*. *Jurnal Komunikasi*, 9(3), 123-137.
- [17] Smith, J. (2010). *Infrastructure Development and Social Dynamics in Multicultural Regions*. *Journal of Urban Studies*, 47(5), 1023-1040.
- [18] Ting-Toomey, S. (1999). *Communicating Across Cultures*. Guilford Press.
- [19] Tilly, C. (2004). *Social Movements, 1768–2004*. Paradigm Publishers.
- [20] Taylor, C. (1994). *Multiculturalism and the Politics of Recognition*. Princeton University Press.